

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abidin, A.Z. 2002. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Al-Mawardi. 1973. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2018. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, UII Press.
- Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum. 2015. *Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, Laode M. Syarif. 2010. *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Mizan Publika, Jakarta.
- Bentham, Jeremy. 1789. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son.
- Bentham, Jeremy. 1789. *Principles of Morals and Legislation*.
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Henry P. Panggebean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2023. *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibn Taimiyah. 1398 H. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- ICW (Indonesia Corruption Watch). 2021. *Laporan pemantauan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi*. ICW.
- J. Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung; Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Klitgaard, Robert. 1988. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023. *Laporan Perkembangan Pemberantasan Korupsi 2022*. Jakarta: KPK.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). 2022. *Studi Dampak PERMA No. 1 Tahun 2020 terhadap Proporsionalitas Putusan Korupsi*. Jakarta: LeIP.
- Mahkamah Agung RI. 2023. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2022*. Jakarta: MA RI.
- Mahrus Ali. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hukum dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Mirza Satria Buana. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Ali. 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*. Jakarta: Pustaka Amani Ardianto Elvinaro.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2015. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustofa, H. W. S. 2013. *Kode Etik Hakim*, Prenada Media.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung. 2023. *Analisis Efisiensi Peradilan Pasca Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2020*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hal. 67-82. Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan Pemulihan Kerugian Negara 2022*. Jakarta: BPK RI.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradinya Paramita.
- Radbruch, Gustav. 1999. *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. ctk 3. Jakarta. Stora Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma
- Sri Sutatiek. 2013. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*, Yogyakarta Aswaja Pressindo.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syed Hussein Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Syihabuddin Al-Qarafi. 1994. *Az-Zakhirah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. Jilid 12.
- Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu. 2014. *Studi atas Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

JURNAL

- Achmad Edi Subiyanto. 2012. Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, hlm. 667.
- Alkostar, A. 2021. Penggunaan Tabel Pemidanaan Dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 231-248.
- Alkostar, A. 2022. Peningkatan Profesionalisme Hakim Melalui Pedoman Pemidanaan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 1-18.
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiartha. 2020. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September.
- Atmasasmita, R. 2021. PERMA No. 1 Tahun 2020: Memperkuat Akuntabilitas Hakim Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 580-597.
- Atmasasmita, R. 2024. Pendekatan Holistik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 11(1), 1-20.
- Atmasasmita, Romli. 2021. Dilema PERMA No. 1/2020 dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1).
- Azhari, A. F. 2021. Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2020. *Jurnal Etika & Pemilu*, 7(1), 1-15.
- Cahya Palsari. 2021. Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 3, November.
- Dewa Gede Atmaja. 2018. Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.12, No. 2, hlm. 146.

- Fence M Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3.
- Fence M. Wantu. 2007. Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober*.
- Firman Floranta Adonara. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2*.
- Fitriasih, Surastini. 2022. Implementasi PERMA No. 1/2020: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Yudisial, 15(2)*.
- Hasaziduhu Moho. 2021. Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. *Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1 No. 1, Februari-Juli*.
- Hiariej, E. O. S. 2021. Independensi Hakim Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2), 241-262*.
- Hiariej, E. O. S. 2023. Pedoman Pemidanaan Dan Perkembangan Modus Operandi Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 9(1), 1-18*.
- Hidayat, S. 2023. Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama. *Tafaqquh; Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*.
- Husein, Y. 2022. Penguatan Independensi Hakim Melalui PERMA No. 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(1), 39-58*.
- Husein, Y. 2023. Implikasi PERMA No. 1 Tahun 2020 Terhadap Strategi Penuntutan Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Kejaksaan, 8(1), 1-20*.
- Inge Dwisiyimiari. 2011. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmiah, Vol. 11, No. 3*.
- Irfan Ardiansyah. 2017. Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica 17, No. 1*.
- Irianto, S. 2023. Aspek Sosio-Kultural Dalam Penerapan Pedoman Pemidanaan Kasus Korupsi. *Jurnal Antropologi Hukum, 7(2), 155-172*.
- Iriawan, A. I. 2023. Penerapan Konsisten PERMA No. 1 Tahun 2020 Oleh Hakim. *Varia Peradilan, 38(449), 5-22*.
- Iriawan, A. I. 2024. Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Implementasi Pedoman Pemidanaan Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(1), 41-60*.
- Jaya, S. 2022. PERMA No. 1 Tahun 2020 Sebagai Perlindungan Hakim Dari Tekanan Publik. *Jurnal Yudisial, 15(2), 167-184*.
- Lubis, T. M. 2022. Keseimbangan Antara Pedoman Pemidanaan Dan Diskresi Hakim Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 104-123*
- Mahfud MD. 2020. Independensi, Akuntabilitas, Dan Integritas Hakim Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Konstitusi, 17(1), 1-26*.

- Manan, B. 2019. Kebebasan Yang Bertanggung Jawab: Prinsip Independensi Hakim Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 1-20.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 15.
- Mochtar, Z. A. 2022. Transparansi Penggunaan Pedoman Pemidanaan Dan Kepercayaan Publik Terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 388-407.
- Mohamad Zaenal Arifin. 2019. Guhlul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi, dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Syar'ie*, Vol. 1, 2019, hlm. 60.
- Nugroho, H. 2022. PERMA No. 1 Tahun 2020 Dalam Konteks Perkembangan Kebijakan Anti-Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 1-18.
- Pangaribuan, L. M. P. 2020. Fleksibilitas Dalam Pedoman Pemidanaan Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 517-534.
- Purwoto Ajeng Arindita Larasati, Pujiyono. 2019. Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3.
- Ramadhan, C. R. 2023. Analisis Variasi Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 di Pengadilan Tipikor. *Jurnal Integritas*, 9(1), 41-62.
- Reksodiputro, M. 2021. Dampak PERMA No. 1 Tahun 2020 terhadap Dinamika Persidangan Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 1-20.
- Santoso, M. A. 2012. Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan DiIndonesia". *Yustisia*, 1(3), 21
- Santoso, T. 2022. Evaluasi Berkelanjutan Terhadap Pedoman Pemidanaan Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 556-575.
- Seno Adji, I. 2021. Kreativitas Hakim Dalam Menganalisis Keunikan Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 145-164.
- Simatupang, D. P. 2022. PERMA No. 1 Tahun 2020: Menyeimbangkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 124-143.
- Simatupang, D. P. 2024. Implikasi Pedoman Pemidanaan Terhadap Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1-20.
- Situmeang, S. M. T. 2019. Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).

- Suhariyono, A. R. 2018. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi: Analisis Putusan Pengadilan Tahun 2015-2017. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193-217.
- Suparman Marzuki. 2015. Pengadilan yang fair: Kecendrungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 22, No. 3.
- Susanti, B. 2023. Konsistensi Pemidanaan Dan Efek Jera Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Integritas*, 9(2), 157-176.
- Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. 2017. Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara No. 31/Pdt. G/2015/Pn. *Sky.Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*.
- von Hirsch, Andrew. 1992. Proportionality In The Philosophy Of Punishment. *Crime and Justice*, 16, 55-98.
- Yuli Indarsih. 2020. Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan. *e-Jurnal Binawakya*. Vol. 15 No. 4, Nopember.
- Idami, Z. 2015. Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Taâ€™zir, Macamnya dan Tujuannya. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 20-43.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ARTIKEL

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>
diakses pada tanggal 4 September 2024 pukul 12.25

- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Laporan Pemantauan Tren Vonis Kasus Korupsi Semester I 2021*.
- Kejaksaan Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI 2022*.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2021*.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2022). *Survei Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum Kasus Korupsi*.
- MaPPI FHUI. (2022). *Laporan Studi Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- PN-Tilamuta. “Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020, Mahkamah Agung Intens Berupaya Dalam Menyusun Pedoman Pemidanaan” terdapat dalam <https://pn-tilamuta.go.id/2021/04/29/melalui-perma-nomor1-tahun-2020-mahkamah-agung-intens-berupaya-dalam-menyusun-pedoman-pemidanaan/> diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 19.15 WIB.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2023). *Evaluasi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi*.
- Sudikno Mertokusumo, ‘Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman’, terdapat dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-daristruktur.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 14.13 WIB.
- Sudikno Mertokusumo, ‘Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman’, accessed 3 Oktober 2024, <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakimditinjau-daristruktur.html>.
- Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya, terdapat dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pada pukul 21.55 WIB.